ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH YANG OPINI WTP DAN NON WTP PADA KOTA PADANG DAN KABUPATEN MENTAWAI TAHUN 2020

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akunansi (DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya



OLEH:

IMAM SYAFWAN

17133042

PROGRAM STUDI AKUNTANSI DIPLOMA III
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2022

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH YANG OPINI WTP DAN NON WTP PADA KOTA PADANG DAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2020

lama : Imam Syafwan

Nim :17133042

Program Studi : Akuntansi (DIII)

Fakultas : Ekonom

Diketahui Oleh

Koordinator Program Studi

Diploma III Akuntansi

Halkadri Fitra, SE, MM,Ak NIP. 19800809 201012 1 003 Padang, September 2022

Disetujui Oleh

Peribimbin,

Dian Fitria Handayani, SE, M,Sc NIP.

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

ANALISIS PERBANDINGAN KINERUA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH YANG OPINI WTP DAN NON WTP P ADA KOTA PADANG DAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2020

Nama : Imam syafwan

Nim : 1713304

Program Studi : Akuntansi (DIII)

Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhii Program Studi Akuntansi (DIII)

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, September 2022

Tim Penguji

Nama

Dian Fitria Handayani, SE, M.Sc

Anggota

Ketua

Henri Agustin, SE, M.Sc, AK

Anggota S

Salma Taqwa, SE,M.Si

CS Dipindal dengan CamScanne

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Imam syafwan

Thn. Masuk/ Nim

: 2017/17133042

Tempat/ Tgl Lahir

: Sawahlunto,05Januari 1998

Program Studi

: Akuntansi (D3)

Fakultas

: Ekonomi

Alamat

: Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto.

Judul Tugas Akhir

: Analisis Perbandingan Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Opini WTP Dan Non WTP pada Kota Padang Dan Kabupaten

Kepulauan Mentawai Tahun 2020

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

 Tugas akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.

Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.

 Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

 Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, September 2022 Yang menyatakan

Imam syafwan NIM.17133042

ABSTRAK

IMAM SYAFWAN : ANALISIS PERBANDINGAN LAPORAN

KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

YANG OPINI WTP DAN NON WTP PADA

KOTA PADANG DAN KABUPATEN

KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2020.

PEMBIMBING: DIAN FITRIA HANDAYANI, SE, M, Sc

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat analisis perbandingan kinerja laporan keuangan pemerintah daerah kota padang dan kabupaten Mentawai tahun 2020. Terdapat permasalahan yaitu: 1) Penerimaan pendapatan daerah yang masih rendah. 2) Pemerintah daerah lebih meningkatkan pengawasan terhadap program yang telah di ajukan oleh SKPD agar dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang di harapkan. 3) Pemerintah daerah juga lebih meningkatkan belanja modal yang dapat digunakan sebagai inverstasi ataupun penerimaan di kemudian hari.

Penelitian ini tergolong penelitian observasi yang terencan, tertata secara sistematik yaitu analisis perbandingan kinerja laporan keuangan pemerintah daerah yang Opini WTP dan Non WTP tahun 2020. Yang di peroleh dari Badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kinerja keuangan kota padang dan kepulauan Mentawai ditinjau dari : 1) Rasio kemandirian tahun 2020 untuk kota padang memiliki ratarata 43,07% dengan kriteria "rendah" sekali" 2) Rasio pertumbuhan PAD untuk kota padang memiliki rata-rata 23,06% dengan kriteria "kurang baik" dan kabupaten kepulauan mentawai memiliki rata-rata 4,19% dengan kriteria " tidak baik".

Kata kunci : Laporan Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian, Rasio

Efektivitas Keuangan Daearah.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat yang telah diberikan penulis, baik kesehatan fisik dan mental sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelas Ahli Madya program studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga memungkinkan tugas akhir ini terwujud. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

- 1. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis dan semua keluarga besar penulis yang tidak pernah hentinya memberikan doa dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini meskipun banyak kendala yang penulis temukan namun dengan doa kedua orang tua dan semua keluarga besar lah yang mempermudah atas urusan yang penulis temui dan semua ini atas izin Allah SWT.
- Bapak Dr.Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Bapak Halkadri Fitra, SE. M.M, Ak selaku Ketua Prodi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- 4. Ibu Charoline Cheisviyanny, SE, M. Ak selaku pembimbing akademik yang telah membimbing dan mengarahkan saya sejak

awal perkuliahan, baik berupa saran, dan motivasi yang sangat

membantu.

5. Dian Firia Handayani SE, M.sc selaku pembimbing tugas akhir

yang telah membimbing dan mengarahkan saya dalam

penyelesaian tugas akhir ini.

6. Para dosen dan staf pengajar serta karyawan yang telah membantu

penulis menuntut ilmu di almamater ini.

7. Rekan – rekan seperjuangan dan semua pihak yang telah

membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir.

8. Kepada semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat

disebutkan satu – persatu.

Atas segala kemudahan yang telah diberikan oleh semua pihak diatas

maka dengan tulus dan rendah hati penulis ucapkan semoga Allah SWT

memberikan balasan yang setimpal atas apa yang telah mereka berikan. Apabila

ada kesalahan dan kejanggalan dalam Tugas Akhir ini penulis mohon maaf yang

sebesar-besarnya, karena tidak ada manusia yang luput dari kesalahan.

Padang, Januari 2022

Imam Syafwan

٧

DAFTAR ISI

DAF	ΓAR ISI	vi
DAF	ΓAR TABEL	vii
BAB	I	
PENI	DAHULUAN	
A.	Latar Belakang Masalah	
В.	Perumusan Masalah	
C.	Tujuan Penelitian	8
D.	Manfaat Penelitian	9
BAB	II	10
TINJ	AUAN PUSTAKA	10
A.	Keuangan Daerah	10
B.	Analisis Kinerja Keuangan Daerah	14
C.	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Error! Bookma	
D.	Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah Error! Bookma	
E.	Basis Akuntansi	18
F.	Audit Sektor Publik	20
G.	Opini Audit	22
BAB	III	25
MET	ODE PENELITIAN	25
A.	Bentuk Penelitian Tugas Akhir	25
B.	Lokasi Dan Waktu Penelitian	
C.	Rancangan Penelitian	26
D.	Teknik Analisis Data	28
BAB	IV	34
PEM	BAHASAN	34
A.	Hasil Pembahasan	34
BAB	V	59
	UTUP	
A.	Kesimpulan	
B.	Saran	
DAF	ΓAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Opini BPK atas LKPD	5
Tabel 2.1. Kriteria Rasio Kemandirian Daerah	.15
Tabel 2.2. Kriteria Rasio Efektifitas Kinerja Keuangan Daerah	.16
Tabel 2.3. Kriteria Rasio Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah	16
Tabel 4.1. Rasio Kemandirian Pemerintah Daerah Kota Padang dan Kabupaten	
Mentawai	.42
Tabel 4.2. Rasio Efektfitas Pemerintah Daerah Kota Padang dan Kabupaten	
Mentawai	.44
Tabel 4.3. Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah Kota Padang dan Kabupaten	
Mentawai	46
Tabel 4.4. Rasio Belanja Operasi Pemerintah Daerah Kota Padang dan	
Kabupaten Mentawai	49
Tabel 4.5. Rasio Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Padang dan	
Kabupaten	51
Tabel 4.6. Rasio Pertumbuhan PAD Pemerintah Kota Padang dan Kabupaten	
Mentawai	.54
Tabel 4.7. Rasio Pertumbuhan PAD Pemerintah Kota Padang dan Kabupaten	
Mentawai	.55

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menjadi titik awal dimulainya otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya (Wibawa Et. Al, 2017).

Kemampuan daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah yang dimilikinya sebagai sumber pendapatan daerah akan sangat menentukan keberhasilan kebijakan otonomi daerah tersebut. Keseriusan pemerintah Indonesia mengenai otonomi daerah diwujudkan dengan dihasilkannya UU No. 22 tahun 1999 yang telah diganti dengan UU No. 32 tahun 2004 mengenai pembagian kewenangan di pemerintah daerah, dan UU

No. 25 tahun 1999 yang telah diganti dengan UU No. 33 mengenai Pembagian Keuangan antara Pusat dan Daerah. Undang-undang tersebut telah dijadikan sebagai aturan umum dalam implementasi kebijakan otonomi daerah di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, otonomi daerah diharapkan bisa menjadi jembatan bagi pemerintah daerah untuk mendorong efisiensi ekonomi, efisiensi pelayanan publik sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal melalui berbagai efek multiplier dari desentralisasi yang diharapkan bisa terwujud. Selain itu pemerintah daerah dituntut untuk dilakukan secara transparansi dalam memberikan informasi, partisipatif untuk terlibat, dan memiliki akuntabiltas yang tinggi (Nurabiah, 2018).

Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah melakukan reformasi dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam undang-undang ini tercantum materi pemekaran wilayah pada pasal 4 ayat 3 dan ayat 4, istilah yang digunakan adalah pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah pada dasarnya bertujuan untuk peningkatan pelayanan (service delivery) Pemerintah Daerah (local government) kepada masyarakat, agar lebih efisien dan efektif terhadap potensi, kebutuhan maupun karakteristik di masing-

masing daerah. Dengan demikian adanya pemekaran wilayah seharusnyaakan membuat suatu daerah menjadi semakin terbuka, jalur pengembangannya lebih luas,tersebar keseluruh wilayah (Taufik, 2017).

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Disamping itu Undang- undang di atas mengandung penekanan bahwa adanya proses yang lebih cepat untuk mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat (Taufik, 2017).

Laporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan pernyataan dari pihak manajemen pemerintah daerah yang menginformasikan kepada pihak lain, yaitu pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang ada tentang kondisi keuangan pemerintah daerah. Agar informasi itu dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, maka informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif (relevan, handal, dan dapat dipahami) sehingga dapat digunakan untuk

pengambilan keputusan.Untuk memenuhi karakteristik kualitatif maka informasi dalam laporan keuangan harus disajikan sesuai berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum (Taufik, 2017).

Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 31 yang mengatur bahwa Kepala Daerah harus memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tersebut setidaktidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah. Agar laporan keuangan pemerintah daerah bermanfaat untuk pengambilan keputusan, maka laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu relevan, handal dan dapat dipahami (PP No. 71 Tahun 2010) (Taufik, 2017).

Faktanya, tidak semua pemangku kepentingan memahami akuntansi yang merupakan alat untuk menghasilkan laporan keuangan. Hal ini dikarenakan tidak semua pengguna laporan mampu memahami akuntansi dengan baik. Padahal di sisi lain merekapun mengandalkan informasi keuangan itu untuk membuat keputusan. Oleh karena itu, ketidakmampuaan memahami dan menginterpretasikan laporan keuangan tersebut perlu dibantu dengan adanya analisis laporan keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah dengan cara analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan sendiri didefinisikan sebagai usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia.

Pemerintah Daerah Kota Padang dan Pemerintah Daerah Kabupaten Mentawai, sebagai pemerintah yang menjalankan otonomi daerah, juga harus menjalankan otonomi keuangan yang harus dilakukan secara akuntabel dan transparansi. Dengan kata lain, pemerintah daerah Kota Padang dan pemerintah daerah Kabupaten Mentawai harus mempunyai kemandirian dalam pengelolaan keuangan daerah. Berkaitan dengan kemandirian pengelolaan keuangan daerah Kota Padang dan Kabupaten Mentawai ini berdasarkan opini dari BPK diketahui bahwa pemerintah daerah Kota Padang mendapat WTP terhadap LKPD sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, sedangkan pemerintah daerah Kabupaten Mentawai tidak selalu mendapatkan opini WTP. Sebagaimana dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Opini BPK atas LKPD

No	Nama Pemda	Opini BPK				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kota Padang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Kabupaten Mentawai	WDP	WTP	WTP	WTP	WDP

Sumber: sumbar.bpk.go.id (2021)

Prestasi WTP pemerintah daerah Kota Padang dan Kabupaten Mentawai menunjukkan adanya kinerja keuangan yang dikelola dengan baik. Meskipun demikian, kinerja keuangan dari masing-masing kabupaten/kota tersebut tidak selalu sama (berbeda-beda). Berkaitan dengan kinerja keuangan dari masing-masing kabupaten/kota tersebut, adalah menarik untuk di teliti mengenai kinerja keuangan yang meliputi rasio efektivitas APBD, rasio efisiensi APBD, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio pertumbuhan PAD, rasio derajat desentralisasi fiskal dan rasio harmoni. Hal ini

dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan; efisiensi dan efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah; sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya; kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam membentuk pendapatan daerah; dan pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu dari masing-masing pemerintahan kabupaten/kota.

Fenomena yang terjadi pada kota Padang pada tahun 2020 mendapatkan opini WTP atas laporan keuangan daerah, opini ini didapatkan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang karena permasalahan yang menjadi temuan pemeriksaan tidak berdampak material terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang tahun 2020. Selama pemeriksaan, temuan pemeriksaan yang memerlukan koreksi telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dengan jurnal koreksi, sehingga telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. BPK memberikan opini tersebut lantaran LKPP tersebut sudah tidak memuat akun yang tidak lazim atau suspen. Akun suspen menunjukkan jika terdapat perbedaan antara realisasi belanja yang dilaporkan kementerian negara atau lembaga (K/L) dengan realisasi belanja negara yang dicatat Bendahara Umum Negara. Akun suspen merupakan salah satu indikator pemberian opini BPK terhadap LKPP.

Pada tahun 2020 Kabupaten mentawai memperoleh opini WDP atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mentawai, opini ini diberikan karena BPK menemukan adanya 4 masalah dalam laporan

keuangan tersebut. Ia melanjutkan, masalah-masalah tersebut sudah ditindaklanjuti, tapi belum efektif.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan perbandingan kinerja laporan keuangan daerang yang memperoleh opini WTP dan opini WDP. Hal ini dikarenakan perbedaan tersebut dapat menunjukan efektivitas dan kinerja pemerintah dalam hal penyerapan anggaran dan belanja daerah yang berbeda. Sehingga apabila dibandingkan dan dianalisis berdasarkan opini BPK, maka dapat ditemukan daerah mana dan tahun berapa yang memiliki kinerja positif dan negatif, dalam hal pengelolaan keuangan daerah sehingga apabila terjadi penurunan atau dalam mengelola keuangannya masih negatif, maka suatu pemerintah baik pusat maupun daerah dapat membentuk kebijakan yang baru untuk memperbaikinya.

Dengan adanya analisis sementara dan penelitian yang mendukung tersebut, maka peneliti ingin mengetahui kinerja keuangan daerah dari Kota Padang dan Kabupaten Mentawai setelah otonomi pada 2020 sesuai dengan opini yang dikeluarkan oleh BPK, serta ingin menguji perbedaan pada keenam rasio disetiap Kota Padang dan Kabupaten Mentawai. Dengan menggunakan pendekatan komperatif (perbandingan) penelitian ini ingin membandingkan kinerja keuangannya dari masing-masing daerah tersebut, khususnya dalam mengungkap pada tahun berapa saja kinerja keuangan mengalami peningkatan atau penurunan dalam pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kinerja keuangan di Kota Padang dan Kabupaten Mentawai pada tahun 2020 dengan judul "Analisis Perbandingan Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah Yang Opini WTP dan Non WTP Pada Kota Padang dan Kabupaten Mentawai Tahun 2020".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat disimpulkan rumusan masalahnya sebagai berikut:

- Bagaimana tingkat opini WTP yang diperoleh Pemerintah Daerah Kota Padang tahun 2020?
- Bagaimana tingkat opini WDP yang diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mentawai tahun 2020?
- 3. Bagaimana analisis perbandingan kinerja laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang dan Kabupaten Mentawai tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

- Untuk melihat analisis tingkat opini WTP yang diperoleh Pemerintah Daerah Kota Padang tahun 2020.
- Untuk melihat analisis tingkat opini WDP yang diperoleh Pemerintah
 Daerah Kabupaten Mentawai tahun 2020.
- Untuk melihat analisis perbandingan kinerja laporan keuangan Pemerintah
 Daerah Kota Padang dan Kabupaten Mentawai tahun 2020.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh informasi relevan yang dapat memberi kegunaan:

1. Bagi Penulis

Sebagai penerapan dan pengembangan terhadap teori-teori yang telah dipelajari di perkuliahan untuk dapat diterapkan pada permasalahan dalam dunia kerja yang berkaitan dengan akuntansi pemerintahan dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai tambahan bahan referensi dala menganalisis tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga diharapkan masing-masing pemerintah daerah mampu mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah.

3. Bagi Pihak-Pihak Lain

Sebagai bahan masukan dan referensi bagi pihak-pihak lain yang berguna untuk mengetahui kinerja keuangan daerah pada Kota Padang dan Kabupaten Mentawai dari segi opini WTP dan Non WTP